

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik demokrasi di Indonesia

Adi Widya Oktantyo

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: adiocha86@gmail.com

Kata Kunci:

Pancasila, demokrasi, implementasi, sistem politik, tantangan

Keywords:

Pancasila, democracy, implementation, political system, challenges

ABSTRAK

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memainkan peran penting dalam pembentukan sistem demokrasi yang ada saat ini. Meskipun Indonesia mengadopsi sistem demokrasi, nilai-nilai Pancasila memberikan pedoman dalam pengambilan keputusan politik dan sosial. Demokrasi di Indonesia berupaya mengintegrasikan prinsip kebebasan, keadilan, dan partisipasi rakyat dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Namun, penerapannya menghadapi berbagai tantangan, seperti politisasi identitas, korupsi, dan ketimpangan sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem demokrasi Indonesia dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi

dalam mengimplementasikan demokrasi yang sesuai dengan semangat Pancasila. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji hubungan antara Pancasila dan demokrasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya dalam praktik. Diharapkan, temuan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat demokrasi Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan politik dan sosial.

ABSTRACT

Pancasila, as the foundation of the Indonesian state, plays a crucial role in shaping the democratic system today. While Indonesia adopts a democratic system, the values of Pancasila guide political and social decision-making. Indonesian democracy seeks to integrate the principles of freedom, justice, and public participation with the noble values of Pancasila. However, its implementation faces challenges, such as identity politics, corruption, and social inequality. This paper aims to analyze the implementation of Pancasila values within Indonesia's democratic system and identify obstacles in applying democracy in line with Pancasila's spirit. Through a qualitative approach, this study examines the relationship between Pancasila and democracy, as well as factors affecting its application. The findings aim to provide recommendations to strengthen Indonesian democracy by upholding Pancasila values in political and social life.

Pendahuluan

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memainkan peran penting dalam membangun sistem demokrasi nasional. Sebagai landasan ideologis, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga menjadi rujukan dalam merancang kebijakan bagi pemerintah maupun masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman untuk menjalankan demokrasi yang menempatkan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, serta perlindungan hak asasi manusia sebagai prioritas. Sebagai prinsip utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

seharusnya menjadi pondasi yang kokoh bagi demokrasi di Indonesia. Namun, meskipun mengusung nilai-nilai perdamaian, keadilan, dan persatuan, penerapan Pancasila di ranah demokrasi nasional masih menghadapi sejumlah tantangan (Ubaedillah, 2024).

Realitas menunjukkan adanya ketimpangan sosial, praktik korupsi, serta polarisasi politik yang kerap menghambat terciptanya demokrasi ideal. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara prinsip-prinsip Pancasila yang bersifat ideal dengan kenyataan sosial dan politik yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem demokrasi saat ini sekaligus penyusunan langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut. Melalui kajian ini, diharapkan tercapai pemahaman lebih komprehensif tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Selain itu, kajian ini juga bertujuan merumuskan rekomendasi konkret untuk memperkuat implementasi Pancasila guna mewujudkan sistem demokrasi yang lebih baik pada masa mendatang (Salsabila & Sisdianto, 2024).

Pembahasan

Makna dan Relevansi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Praktik Demokrasi di Indonesia

Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, memegang peran penting dalam membentuk sistem demokrasi di Indonesia. Mengacu pada jati diri nasional, Pancasila mencakup nilai-nilai luhur yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam penerapan demokrasi, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya sekadar simbol formal, tetapi juga menjadi fondasi yang menguatkan sistem politik Indonesia agar tetap sesuai dengan karakter serta identitas bangsa (Faslah, 2024).

Dalam sistem kenegaraan Indonesia, Pancasila tidak hanya berperan sebagai dasar negara secara formal, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman nilai yang membimbing pelaksanaan demokrasi. Nilai-nilai seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi landasan bagi terciptanya mekanisme demokrasi yang inklusif dan melibatkan partisipasi semua lapisan masyarakat. Terkait dengan implementasi demokrasi, sila keempat, yakni Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, secara tegas menempatkan rakyat sebagai pusat dalam proses pengambilan keputusan. Secara filosofis, penerapan demokrasi di Indonesia harus berakar pada nilai-nilai Pancasila, bukan semata-mata mengadopsi sistem demokrasi dari negara Barat (Putri Oktaviani Yulias, Apriliana, 2023).

Dengan demikian, relevansi Pancasila dalam praktik demokrasi ialah sebagai fondasi etis dan normatif yang mendasari hak dan kewajiban warga negara, bentuk partisipasi publik, dan penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan beradab. Nilai-nilai Pancasila menjamin bahwa demokrasi tidak hanya tentang suara mayoritas, tetapi juga penghormatan terhadap kemanusiaan, persatuan, dan keadilan social sehingga praktik demokrasi dapat berjalan dalam bingkai kebersamaan dan musyawarah mufakat.

Bentuk-Bentuk Implementasi Nilai Pancasila dalam Praktik Demokrasi

1. Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang Berlandaskan Nilai Pancasila

Pelaksanaan pemilu di Indonesia menjadi salah satu wadah utama untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Sebuah kajian dengan topik "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia" menyimpulkan bahwa pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pemilu bertujuan menghindari pelanggaran demokrasi, seperti ketidakadilan, kurangnya integritas, serta tidak tercapainya proses politik yang damai. Di tingkat praktis, nilai Persatuan (sila ke-3) dan Kerakyatan (sila ke-4) terlihat dalam upaya memastikan pemilu menjadi sarana menghimpun aspirasi rakyat secara adil, bukan sekadar kompetisi kekuasaan antar partai. Nilai Keadilan Sosial (sila ke-5) menuntut agar proses dan hasil pemilu memperhatikan kesejahteraan seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu. Dengan demikian, pelaksanaan pemilu yang ideal mencerminkan demokrasi Pancasila, di mana rakyat berperan sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek pasif.

Musyawarah dan Partisipasi di Tingkat Organisasi Masyarakat dan Pemerintah Nilai-nilai Pancasila juga diterapkan melalui mekanisme musyawarah dan partisipasi, baik di organisasi masyarakat maupun pemerintah. Penelitian bertema "Pengimplementasian Sistem Demokrasi Pancasila dalam Organisasi Kepemudaan Karang Taruna" mengungkap bahwa model "musyawarah mufakat" menjadi ciri khas demokrasi Pancasila yang selaras dengan budaya Indonesia. Musyawarah ini tidak hanya berupa diskusi informal, melainkan proses deliberatif yang melibatkan semua pihak, menghargai perbedaan pendapat, dan mencapai keputusan secara bersama-sama. Sinergi antara nilai Kerakyatan dan Persatuan di sini sangat terlihat; rakyat dilibatkan secara aktif (kerakyatan) dalam semangat kebersamaan (persatuan). Pendekatan ini tidak hanya memperkuat legitimasi sosial pemerintah dan organisasi, tetapi juga membangun budaya demokrasi yang melampaui sekadar mekanisme pemilu formal menuju proses pengambilan keputusan partisipatif.

2. Pendidikan Demokrasi dan Penanaman Nilai Pancasila di Sekolah

Nilai-nilai Pancasila juga diterapkan dalam dunia pendidikan untuk mempersiapkan generasi yang mampu menjalankan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian berjudul "Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan" menyebutkan bahwa nilai-nilai seperti kebebasan berpendapat, toleransi, kerjasama, dan penghormatan terhadap perbedaan diterapkan dalam pembelajaran di kelas PKn/PPKn (Rizki Ramdani, Dinie Anggraeni Dewi, 2021).

Pada tingkatan sekolah, nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan juga diintegrasikan misalnya melalui pembiasaan nilai moral dan penghormatan terhadap keberagaman. Dengan demikian, pendidikan demokrasi tidak hanya soal prosedur dan institusi, tetapi juga pembentukan karakter warga negara yang mampu hidup dalam kebersamaan dan musyawarah.

Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi: Analisis Kritis

Meskipun Pancasila telah diinstitusionalisasikan dalam kerangka formal, penerapannya terutama dari sistem demokrasi di Indonesia masih terus dihadapkan dengan serangkaian tantangan. Salah satu masalah utamanya adalah keterlambatan kematangan budaya demokrasi, yang membuat sebagian masyarakat berpartisipasi hanyalah sebagai tanggapan simbolik atau manipulatif semata. Selain itu, peneliti juga mencatat bahwa kerakyatan dan persatuan seringkali tidak dijalankan bukan karena nilai-nilai moral tidak ekstensif, namun, karena pertama, sikap individu dengan kecenderungan apatis dan kedua, kondisi keluarga dan sosial(Christian Eka Widiawati, Budiono, 2025).

Selanjutnya, nilai Keadilan Sosial juga sering belum terwujud secara merata ketimpangan ekonomi, akses pendidikan dan layanan publik masih menjadi pekerjaan besar. Hal ini berarti bahwa aspek praktis dari nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya menembus struktur sosial. Penelitian mengenai pendidikan karakter menegaskan bahwa degradasi nilai moral dan tindakan korupsi adalah akibat proses pendidikan yang kurang berbasis nilai Pancasila secara konsisten(Ikama Dewi Setia Triana, 2021).

Di sisi institusional dan sistemik, meskipun pemilu dan mekanisme demokrasi formal telah berjalan, masih terdapat persoalan integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang menghambat implementasi sejati demokrasi Pancasila. Landasan konstitusional mungkin ada, tetapi budaya organisasi, mentalitas elit, dan sikap rakyat perlu terus dikesaksikan melalui pendidikan dan pengalaman demokrasi yang bermakna.

Saran Strategis untuk Penguatan Implementasi Nilai Pancasila dalam Demokrasi

Pertama, perlu penguatan pendidikan Pancasila dan demokrasi sejak usia dini secara sistematis baik melalui kurikulum dan aktivitas sekolah maupun melalui lingkungan masyarakat. Penanaman nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter harus memperoleh prioritas untuk menciptakan warga negara yang aktif dan etis.

Kedua, lembaga demokrasi dan pemilu perlu terus diperkuat integritasnya agar pelaksanaan demokrasi tidak tereduksi menjadi rutinitas formal semata. Penyelenggaraan pemilu yang menghormati nilai Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial dapat menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat dan tidak hanya kompetisi kekuasaan belaka.

Ketiga, masyarakat sipil perlu diberdayakan agar suara rakyat tidak hanya melalui pemilihan tetapi juga melalui mekanisme konsultasi, musyawarah, deliberasi publik, serta pengambilan keputusan bersama dengan semangat musyawarah mufakat sebagaimana demokrasi Pancasila.

Keempat, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu menerapkan evaluasi berkala terhadap implementasi nilai Pancasila dalam praktik demokrasi baik di tingkat sekolah, organisasi masyarakat, maupun pemerintahan untuk mengidentifikasi hambatan spesifik dan merancang intervensi yang tepat.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut secara sistematis, diharapkan demokrasi yang dijalankan di Indonesia semakin mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila

secara nyata bukan hanya sebagai jargon, tetapi sebagai budaya dan praktik keseharian yang memperkuat bangsa dan negara.

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk tatanan demokrasi di Indonesia. Sebagai representasi identitas nasional, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi rujukan utama dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam penerapan demokrasi, nilai-nilai Pancasila tidak hanya sekadar menjadi simbol, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman yang memberi jiwa pada sistem politik Indonesia agar sejalan dengan karakteristik bangsa. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menggarisbawahi bahwa kebebasan berpendapat dan berpolitik harus dilakukan dengan menjaga nilai-nilai moral dan keagamaan. Demokrasi berdasarkan Pancasila bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang disertai tanggung jawab kepada Tuhan, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, penerapan nilai ini dalam demokrasi tampak melalui penghormatan terhadap keberagaman agama serta jaminan atas kebebasan beribadah bagi setiap warga negara (Faslah, 2024).

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia merupakan wujud nyata upaya bangsa dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab sosial. Di era modern ini, tantangan seperti globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial memerlukan penafsiran ulang terhadap nilai-nilai Pancasila agar tetap relevan dan dapat diterapkan secara efektif. Salah satu bentuk nyata penerapan nilai Pancasila terlihat dalam penguatan dialog dan kritik konstruktif antargenerasi yang berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat demokrasi sekaligus menanamkan kesadaran kebangsaan. Interaksi antara generasi tua dan generasi muda menjadi platform penting dalam menjaga kesinambungan sekaligus memperbarui pemahaman terkait nilai-nilai Pancasila.

Generasi muda, dengan sudut pandang yang progresif, dapat menyampaikan kritik terhadap sistem yang dianggap kurang memadai, sementara generasi tua menawarkan wawasan historis serta kebijaksanaan berdasarkan pengalaman. Melalui diskusi yang terbuka dan saling menghargai, kedua generasi dapat saling melengkapi untuk membangun masyarakat demokratis yang berintegritas. Kritik yang konstruktif menjadi elemen penting dalam menciptakan demokrasi yang sehat. Penyampaian kritik idealnya didasarkan pada niat untuk membangun, bukan merusak. Sebagai contoh, ketika generasi muda menyoroti kelemahan sistem pendidikan yang dinilai tidak sesuai dengan perkembangan zaman, kritik tersebut disertai dengan usulan solutif, seperti pembaruan kurikulum agar lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi dan kebutuhan dunia kerja modern. Dengan pendekatan ini, nilai-nilai musyawarah, gotong royong, dan keadilan sosial yang menjadi inti Pancasila dapat diwujudkan secara konkret dalam kehidupan demokrasi sehari-hari (Anti Putri et al., 2025).

Demokrasi Pancasila sejatinya bukan hanya sistem politik, melainkan juga sebuah sistem nilai yang mengintegrasikan unsur moral dan sosial. Dalam era digital, penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman etik untuk memastikan penggunaan teknologi tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Demokrasi berbasis Pancasila menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, kehadiran e-demokrasi perlu diarahkan untuk memperkuat nilai Ketuhanan,

Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial dalam kehidupan politik negara.

E-Demokrasi sebagai Wujud Nilai Pancasila

Kemajuan e-demokrasi di Indonesia merepresentasikan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi dinamika globalisasi dan teknologi modern. Pemerintah melalui e-government telah menjalani empat fase penting: web presence, interaction, transaction, dan transformation. Proses ini menunjukkan bagaimana teknologi digital terintegrasi untuk meningkatkan hubungan interaktif antara pemerintah dengan masyarakat, sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas publik.

Dalam perspektif Pancasila, e-demokrasi khususnya mencerminkan pelaksanaan sila keempat, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Melalui teknologi digital, rakyat diberikan ruang untuk menyuarakan aspirasi, menyampaikan kritik, dan terlibat dalam pengambilan keputusan publik. Proses ini menghidupkan semangat musyawarah yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan komunitas. Dengan begitu, teknologi digital tidak hanya menjadi alat administratif tetapi juga sarana memperkuat nilai gotong royong, transparansi, dan keadilan sosial.

Peluang dan Tantangan Penerapan Nilai Pancasila dalam E-Demokrasi

Ada potensi besar dalam mengimplementasikan e-demokrasi di Indonesia. Teknologi digital membuka akses informasi yang lebih luas, mempercepat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat, serta meningkatkan transparansi kebijakan publik. Masyarakat kini memiliki peluang lebih besar untuk berpartisipasi mengawasi pemerintahan melalui media sosial, situs resmi pemerintah, dan platform digital lainnya. Kondisi ini mewujudkan nilai keadilan dan kemanusiaan yang menempatkan rakyat sebagai aktor utama pembangunan bangsa.

Meski begitu, penerapan e-demokrasi juga menghadapi sejumlah tantangan yang dapat menghambat tercapainya nilai-nilai Pancasila. Beberapa hambatan utama meliputi kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan, rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat, serta lemahnya komitmen terhadap etika di dunia maya. Selain itu, birokrasi yang masih cenderung rigid serta ego sektoral antarlembaga pemerintah menjadi penghalang efektivitas e-demokrasi. Dalam menghadapi tantangan ini, prinsip musyawarah dan gotong royong yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi panduan untuk membangun tata kelola digital yang adil dan inklusif.

Revitalisasi Nilai Pancasila melalui Teknologi dan Partisipasi Publik

Menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila di era digital memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat. Pemerintah perlu mengembangkan pendidikan politik yang berbasis digital agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi melainkan juga berperan aktif dalam proses demokrasi. Nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan perlu dijaga melalui penguatan etika digital yang menghormati perbedaan pendapat, menjauhi ujaran kebencian, serta mengembangkan budaya dialog yang sehat. Partisipasi warga dalam ruang digital harus diarahkan untuk memperkuat solidaritas nasional dan semangat kolektivitas. Melalui langkah ini, e-demokrasi dapat

menjadi ruang pembelajaran politik yang tidak hanya membangun kesadaran kritis masyarakat tetapi juga menjaga moral publik sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Harmonisasi E-Demokrasi dengan Demokrasi Pancasila

Agar demokrasi digital tetap berada pada jalurnya, nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman utama dalam penyusunan kebijakan serta pengembangan infrastruktur digital. Prinsip keadilan sosial mendorong pemerataan akses terhadap teknologi bagi seluruh masyarakat, sedangkan nilai persatuan menuntut agar digitalisasi tidak menimbulkan kesenjangan sosial baru. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sangat diperlukan untuk membangun ekosistem e-demokrasi yang etis, transparan, dan berfokus pada kesejahteraan rakyat. Dengan berpijak pada nilai-nilai Pancasila, e-demokrasi dapat berfungsi sebagai katalis untuk memperkuat solidaritas sosial sekaligus memperdalam esensi demokrasi di Indonesia. (Slamet et al., 2009)

Kesimpulan dan Saran

Pancasila memiliki peran mendasar dalam membentuk sistem demokrasi di Indonesia. Sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi pedoman moral dan politik dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Implementasi Pancasila dalam demokrasi terlihat melalui prinsip musyawarah, partisipasi masyarakat, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap kemanusiaan dan kesatuan bangsa. Meski demikian, praktik demokrasi di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti politisasi identitas, korupsi, ketimpangan sosial, hingga rendahnya kesadaran terhadap etika politik. Walaupun secara institusional sistem demokrasi telah diterapkan, nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya melekat dalam budaya politik maupun perilaku masyarakat secara luas. Di era digital saat ini, penerapan demokrasi berbasis Pancasila perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi untuk tetap mengedepankan moralitas, keadilan, serta tanggung jawab sosial. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar ideologis, tetapi juga menjadi panduan etis dalam menavigasi praktik demokrasi agar senantiasa berorientasi pada kemanusiaan, persatuan, dan kesejahteraan rakyat.

Untuk memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem demokrasi Indonesia, langkah-langkah strategis harus diprioritaskan. Pertama, pendidikan karakter dan kewarganegaraan perlu menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini agar generasi muda memiliki kesadaran kritis serta menjunjung etika demokrasi. Kedua, lembaga-lembaga demokrasi dan penyelenggara pemilu perlu memastikan integritas, kejujuran, serta transparansi dalam setiap tahapan proses politik. Ketiga, masyarakat sipil harus diberdayakan untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan publik melalui mekanisme musyawarah, deliberasi, dan partisipasi digital yang sehat. Keempat, baik pemerintah maupun masyarakat perlu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab untuk mendukung penyelenggaraan e-demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Kelima, evaluasi menyeluruh terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila harus dilakukan secara konsisten guna menjamin relevansi sistem demokrasi dalam menghadapi tantangan zaman sekaligus memastikan keberpihakannya pada kepentingan rakyat.

Daftar Pustaka

- Anti Putri, V. F., Pratiwi, I. H., & Hidayatullah, A. D. (2025). Kritisisme Konstruktif dan Dialog Antar Generasi: Mewujudkan Pancasila yang Relevan di Era Globalisasi. *ARembeN Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 3(1), 25–34. <https://repository.uin-malang.ac.id/24556/>
- Christian Eka Widiawati, Budiono, T. H. (2025). Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Meningkatkan Kebebasan Berpendapat Siswa Pada Pembelajaran Pendidikan Pancasila di SMP N 1 SEMPU BANYUWANGI. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10.
- Faslah, R. (2024). *Identitas Nasional, Geostrategi, dan Geopolitik: Membangun Keberlanjutan dan Kedaulatan (I)*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <http://repository.uin-malang.ac.id/20872/>
- Ikama Dewi Setia Triana, I. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Dalam Menciptakan Pendidikan Karakter yang Kuat Bagi Bangsa Indonesia dalam Tatanan Hukum Nasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 340–355.
- Putri Oktaviani Yulias, Apriliana, S. T. M. (2023). Demokrasi dalam Dimensi Nilai-Nilai Pancasila Berdasarkan Paradigma Philosophische Grondslag. *Civilia : Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan ISSN*, 2.
- Rizki Ramdani, Dinie Anggraeni Dewi, Y. F. F. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan DEWANTARA* ..., 5(3), 9034–9038.
- Salsabila, D., & Sisdianto, E. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(11), 316–331.
- Slamet, Hamdan, A. R. bin, & Deraman, A. (2009). E-Demokrasi di Indonesia, Antara Peluang dan Hambatan Pendekatan Fenomenologis. *Seminar Nasional Informatika*, 2009(semnasIF), 85–93. <https://repository.uin-malang.ac.id/10741/>
- Ubaedillah, A. (2024). *Pancasila, demokrasi, & pencegahan korupsi*.